

LENTERA

Inspirasi Perubahan

PISAH PEMILU 2029, SIAPA DIUNTUNGKAN?

Model Pemisahan Pemilu Usai Keputusan MK

Pemisahan Secara Horizontal

- Membagi antara pemilu eksekutif dan legislatif.
- Pemilu eksekutif bisa dilakukan serentak mencakup pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan Pilkada Provinsi serta Kabupaten/Kota.
- Pemilu legislatif meliputi pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, dilakukan dalam waktu yang juga serentak tapi berbeda tahunnya

Pemisahan Secara Horizontal

- Membagi antara pusat dan daerah.
- Pemilu tingkat pusat seperti pilpres, DPR RI, dan DPD dilakukan serentak terlebih dahulu.
- Pemilu daerah mencakup pilkada serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di waktu yang berbeda.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan pelaksanaan pemilu nasional dipisahkan dari pemilu daerah mulai Pemilu 2029. Putusan ini tertuang dalam amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian uji materi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam putusan MK menyatakan pemilu nasional, mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, harus dilaksanakan terpisah dari pemilu daerah, yaitu pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan kepala/wakil kepala daerah. Jarak waktu antara pemilu nasional dan daerah ditetapkan minimal dua tahun dan maksimal dua setengah tahun setelah pemilu nasional. Siapa diuntungkan dari putusan ini? Bisa dibilang para anggota dewan di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, paling diuntungkan. Realisasi dari putusan itu, pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD RI bakal digelar 2029 dan pemilihan kepala daerah dan DPRD digelar 2031. Artinya, ada potensi sekitar 2 tahun masa jabatan legislator daerah diperpanjang. Beda dengan kepala daerah yang memungkinkan dilakukannya penunjukan penjabat (Pj). Sementara bagi partai-partai politik tak perlu lagi menyiapkan jagoannya secara borongan. Ada kesempatan lebih banyak untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon pemimpin, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Keuntungan bagi pemilih, masyarakat punya kesempatan untuk mengevaluasi kinerja partai atau calon. Juga dapat mengatasi kelelahan akibat serangkaian proses pemilu serentak yang diduga membuat berkurangnya minat mencoblos. Buktinya, rata-rata partisipasi pemilih dalam pilpres dan pileg kemarin mencapai 81 persen, sedangkan pilkada hanya 70 persen.

BACA HAL 11...



Skema Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah

PENGELOMPOKAN PENYELENGGARA PEMILU	JENIS PEMILU	PERIODE MASA JABATAN SAAT INI	PEMILU BERIKUTNYA
Pemilu Nasional	Presiden	2024 - 2029	2029
	DPR	2024 - 2029	2029
	DPD	2024 - 2029	2029
Pemilu Daerah	Gubernur, Bupati, dan Walikota	2025-2031	2031
	DPRD Provinsi	2024-2031	2031
	DPRD Kabupaten/Kota	2024-2031	2031

PRABOWO: RI CAPAI SWASEMBADA ENERGI PALING LAMBAT 6 TAHUN LAGI

Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan bila Indonesia akan mewujudkan cita-cita swasembada energi. Paling lambat, menurutnya, akan terwujud dalam 6 tahun ke depan.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan.

Keyakinan tersebut disampaikan pada groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Artha Industrial Hills (AIH), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Minggu (29/6/2025).

"Saudara-saudara sekalian, saya diberi tahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi. Dan hitungan saya tidak lama, tidak lama. Lima tahun, paling lambat enam tahun, kita bisa swasembada energi," kata Prabowo.

Prabowo menyebut listrik dan tata surya merupakan kunci mewujudkan swasembada energi. Pembangunan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik merupakan salah satu upaya mewujudkan hal tersebut.

"Dan hari ini kita saksikan, hari ini tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Kita butuh, kalau tidak salah, para pakar laporan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 gigawatt," ujarnya.

"Berarti mungkin proyek ini harus dilipatgandakan. Mungkin. Dan saya percaya bahwa kita mampu untuk melaksanakan itu," lanjut Prabowo.

Dia menyebut Indonesia dapat menghemat hingga US\$58 miliar atau setara Rp939,6 triliun per tahun (asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS) jika sudah mencapai swasembada energi.

Prabowo menyebut angka itu didapat dari penghematan subsidi bahan bakar dan listrik serta dari berkurangnya biaya impor bahan bakar.

Prabowo berterima kasih kepada

para mitra dan semua unsur dalam upaya mewujudkan pembangunan proyek tersebut. Prabowo mengapresiasi kerja sama masih terus terjalin di tengah konflik geopolitik.

"Saudara-saudara, saya ucapkan selamat kepada semua unsur dan terima kasih, kawan-kawan kita dari CATL, dari Tiongkok. Kerja sama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak," ujarnya.

Prabowo menekankan pentingnya menjaga perdamaian. Ia lalu mengutip pepatah China.

"Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian. Dan



Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) terbesar di Asia, di Karawang, Jawa Barat, hari ini, Minggu (29/6/2025). (ist)

tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Dan Indonesia selalu memilih kerja sama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah. Selalu memilih persahabatan di atas permusuhan," lanjut Prabowo.

"Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkok yang saya ambil alih," lanjutnya. (wid,rls,ant/dya)

Pabrik Baterai Kendaraan Listrik RI-China Beroperasi 2026

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kapasitas produksi megaprojek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) konsorsium Indonesia-China bisa setara 300.000 mobil listrik dan 40 gigawatt per hour (GWh) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Bahlil mengatakan, proyek baterai kendaraan listrik dari hulu ke hilir di Halmahera Timur, Maluku Utara, dan Karawang, Jawa Barat, ini memiliki kapasitas produksi 15 GWh.

"Untuk lokasi ini, Pak Presiden, kita resmikan kapasitas 15 GWh. 15 GWh ini setara dengan baterai untuk sekitar 250.000-300.000 mobil," ungkapnya saat groundbreaking Proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Antam-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) Karawang, Minggu (29/6/2025).

Proyek tersebut merupakan pengembangan industri dari hulu ke hilir yang terdiri dari 6 proyek secara terintegrasi yang dikembangkan oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Indonesia Battery Corporation (IBC), dan Konsorsium CATL Brunp dan Lygned (CBL) yang merupakan anak perusahaan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL).

Megaprojek tersebut mencakup 5 proyek yang dikembangkan di Kawasan PT Feni Haltim (FHT) yang merupakan Joint Venture (JV) Antam

dan Hong Kong CBL Limited (HK CBL) di Halmahera Timur, serta 1 proyek dikembangkan di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang.

Pada fase pertama, pabrik tersebut akan memproduksi 6,9 GWh mulai tahun 2026, dan mencapai kapasitas penuh sebanyak 15 GWh pada tahun 2028. Baterai yang diproduksi tidak hanya untuk kendaraan, namun juga untuk panel Surya (Solar PV).

"Kita juga membangun tidak hanya baterai mobil, tapi juga baterai untuk menyimpan energi dari solar panel. Inshaallah, mereka bersedia untuk kita kembangkan agar semua produk ada di dalam negeri," jelas Bahlil.

"Target kita, di sini, dengan pasar yang sudah naik untuk baterai PLTS, bisa sampai 40 GWh," imbuhnya.

Proyek tersebut rencananya memakan investasi USD 5,9 miliar atau setara Rp 96 triliun dan menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 yang tidak langsung. Proyek ini juga digadag-gadag bisa menekan impor BBM.

"Ini bisa menghemat impor BBM sekitar 300.000 kiloliter per tahun kalau hanya 15 GWh," katanya.

Adapun di kawasan Industri FHT terdapat 5 subproyek utama, yaitu pertambangan nikel, kedua subproyek smelter pirometalurgi (RKEF) yang menghasilkan produk

5 Subproyek Utama di Halmahera Timur, Maluku Utara

1. Pertambangan nikel

2. Smelter pirometalurgi (RKEF) yang menghasilkan produk refined nickel alloy dengan rencana produksi sebesar 88 ribu ton per tahun. Proyek ini direncanakan mulai produksi pada tahun 2027.

3. Subproyek smelter hidrometalurgi (HPAL), menghasilkan produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan rencana produksi sebesar 55 ribu ton per tahun. Proyek ini direncanakan mulai produksi pada tahun 2028.

4. Subproyek bahan baterai dengan produk bahan katoda Nickel Cobalt Manganese (NCM) dengan rencana produksi sebesar 30 ribu ton per tahun. Proyek ini direncanakan mulai produksi pada tahun 2028.

5. Subproyek daur ulang baterai yang menghasilkan produk Nikel Cobalt Mangan Sulfat dan Lithium dan Lithium Karbonat dengan rencana produksi sebesar 20 ribu ton per tahun. Proyek ini direncanakan mulai produksi pada tahun 2031.

Subproyek di Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Proyek pabrik Baterai Lithium Ion yang merupakan JV antara IBC dan Konsorsium CBL.

refined nickel alloy dengan rencana produksi sebesar 88 ribu ton per tahun. Proyek ini direncanakan mulai produksi pada tahun 2027.

Ketiga yakni subproyek smelter hidrometalurgi (HPAL), menghasilkan produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan rencana produksi sebesar 55 ribu ton per tahun. Proyek ini direncanakan mulai produksi pada tahun 2028.

Terakhir, subproyek daur ulang baterai yang menghasilkan produk Nikel Cobalt Mangan Sulfat dan Lithium dan Lithium Karbonat dengan rencana produksi sebesar 20 ribu ton per tahun. Proyek ini direncanakan mulai produksi pada tahun 2031. (qid,rls,ant/dya)

TEKEN MOU PENYADAPAN TANPA UU KHUSUS, DPR SEGERA PANGGIL KEJAGUNG

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan segera memanggil Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan empat operator seluler untuk melakukan penyadapan dinilai salah aturan. Seharusnya, langkah itu dilakukan melalui undang-undang khusus yang hingga kini masih dalam pembahasan pemerintah dan DPR.

Kejaksanaan Agung menekankan nota kesepahaman dengan sejumlah penyedia layanan telekomunikasi. Nota itu berfokus pada pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi—yang juga mencakup soal penyadapan informasi.

DPR RI mengkritisi karena hal tersebut harusnya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-VIII/2010. Dikatakan penyadapan harus diatur dalam suatu peraturan khusus.

Dengan begitu, Komisi III akan memanggil Kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait kerja sama penyadapan dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT XLsmart Telecom Sejahtera Tbk.

"Putusan MK itu jelas menyatakan bahwa penyadapan harus diatur melalui undang-undang khusus. Sampai hari ini, beleid itu belum juga dibentuk, baik oleh pemerintah maupun DPR," kata Anggota Komisi III Nasir Djamil, dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (29/6/2025).

Selain itu, ia menjelaskan bahwa dalam Pasal 30C UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan telah mengatur kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan. Yakni, secara eksplisit ditegaskan bahwa penyadapan hanya dapat diimplementasikan setelah ada UU khusus tentang penyadapan.

"Ada kesepahaman antara pemerintah dan DPR saat itu bahwa pelaksanaan Pasal 30C baru bisa dilakukan jika UU Penyadapan sudah terbentuk," kata Nasir.

Dengan begitu, dirinya menegaskan bahwa pihaknya di Komisi III akan memanggil Kejaksaan dan meminta penjelasan terkait nota



Pembeli saat registrasi eSIM menggunakan data biometrik di booth XL Axiata dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri tentang eSIM dan Pemutakhiran Data di Jakarta, April lalu. (dok)

kesepahaman dengan empat operator seluler dalam rangka penyadapan tersebut.

"Mudah-mudahan awal Juli ini kami bisa mengundang Kejaksaan Agung. Salah satu agendanya tentu untuk meminta penjelasan terkait nota kesepahaman ini. Kami tidak ingin ada kesalahpahaman dalam memahami Pasal 30C," pungkasnya.

Potensi Pelanggaran Data Pribadi

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan penegakan hukum memang penting. Namun, ia mewanti-wanti potensi pelanggaran atas data pribadi yang bisa dilakukan oleh

kejaksaan.

"Penegakan hukum sangat penting, tapi Kejaksaan harus memperhatikan hak atas perlindungan data pribadi karena hak privat adalah hak konstitusional," ujar Puan dalam keterangan tertulis.

Puan menekankan pentingnya menjaga batas antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Menurut Puan, kerja sama yang berlandaskan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan ini tak boleh mengabaikan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Dalam penegakan hukum, Puan

Dinilai Problematis karena Langgar Hak Digital

KERJA sama Kejaksaan Agung dengan sejumlah penyedia layanan telekomunikasi terkait penyadapan dinilai "problematis" oleh pengamat dan pegiat hak digital. Sebab tindakan itu tergolong pengawasan massal yang berpotensi melanggar hak atas privasi.

Peneliti isu kebijakan digital, Wahyudi Djafar, mengatakan belum ada regulasi yang mengatur pembatasan aktivitas penyadapan oleh Kejaksaan.

"Menjadi problematis ketika membaca bagaimana kesepakatan antara Kejaksaan Agung dengan operator-operator ini...[karena] mengesankan bahwa Kejaksaan Agung akan melakukan istilahnya surveillance [pengawasan] massal," kata Wahyudi.

Peneliti kebijakan digital dari Raksha Initiatives, ini menjelaskan selama ini kejaksaan belum memiliki regulasi yang mengatur pembatasan penyadapan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 C menyebut "penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. "Sayangnya Undang-Undang Penyadapan itu belum ada," kata Wahyudi

Wahyudi menjelaskan, penyadapan tak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena sifatnya membatasi hak asasi seseorang.

Karena itu, menurutnya, pembatasan harus ada. Bentuknya dapat berupa ketentuan, seperti penyadapan wajib mendapat surat perintah pengadilan atau untuk kasus-kasus dengan barang bukti yang cukup.

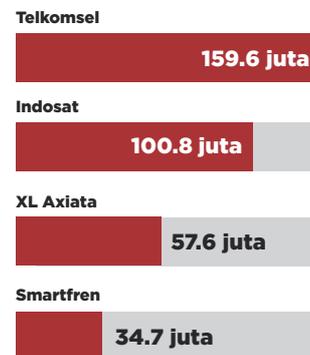
"Tidak bisa kemudian secara umum melakukan pemantauan," kata

menyerukan Kejaksaan Agung perlu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Kepercayaan itu akan tumbuh jika masyarakat merasakan dan meyakini bahwa negara bertindak dalam koridor hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa kerja sama antara aparat penegak hukum dengan pelaku industri tidak hanya dipertimbangkan dari segi efektivitas saja, tapi juga dari perspektif transparansi, akuntabilitas dan perlindungan hak sipil.

Ia tidak ingin kemajuan teknologi dijadikan alat untuk mengawasi secara sewenang-wenang dan mengabaikan prinsip demokrasi. "DPR akan mengawal setiap bentuk integrasi teknologi dalam penegakan hukum agar selaras dengan etika konstitusi," tutur Puan. (wid rls,ant/dya)

PERBANDINGAN JUMLAH PELANGGAN EMPAT OPERATOR SELULER 2024



Sumber: Riset Seluler Kuartal I-2024

Wahyudi.

Tanpa pembatasan penyadapan yang jelas, Kejaksaan bisa "mengakses data secara terus-menerus, melakukan penyadapan secara terus-menerus terhadap komunikasi-komunikasi personal melalui provider-provider telekomunikasi yang melakukan kesepakatan dengan Kejaksaan Agung ini," jelas Wahyudi.

"Ini sangat-sangat mengancam perlindungan hak atas privasi warga negara," tambahnya.

Wahyudi mencontohkan lembaga penegak hukum lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu meminta izin kepada organ internal, yakni Dewan Pengawas, untuk melakukan penyadapan. (wid,rls,bbc/dya)

Dugaan Korupsi Jalan di Mandailing Natal Sumut

**ORANG DEKATNYA TERSANGKA,
KPK BUKA PELUANG PERIKSA BOBBY**

Salah satu tersangka yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan orang dekat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumut Topan Obaja Putra Ginting. Penangkapan ini disebut yang pertama yang melibatkan orang dekat Bobby sejak dia menjabat Wali Kota Medan hingga Gubernur Sumut.

KPK mengakui juga mendapatkan informasi tentang kedekatan Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumatra Utara, Topan Obaja Putra Ginting dengan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution. Hal ini membuat lembaga antirasuah tersebut juga tak menutup kemungkinan akan memeriksa menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

KPK sendiri baru saja menetapkan Topan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatra Utara. Penyidik menangkap Topan dan empat tersangka lainnya dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Kamis lalu.

"Kalau nanti [aliran dana] ke siapa pun; ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas; atau ke gubernur [Bobby Nasution]. Ke mana pun itu dan kami memang meyakini. Kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerjasama dengan PPAK untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak," ujar Pelaksana tugas (Plt) Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Sabtu (28/06/2025).

Dia mengatakan, penyidik memperoleh informasi kedekatan antara Bobby dan Topan bahkan terjadi sebelum keduanya berdinasi di Provinsi Sumatra Utara. Hal ini merujuk saat Bobby, sebagai Wali Kota Medan, tiba-tiba menunjuk Topan menjadi pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Medan.

"Orang dekatnya Gubernur, saudara BN [Bobby Nasution]. Bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya sudah menjadi orang dekatnya," kata dia.

Menurut dia, penyidik selalu menerapkan pola follow the money dalam pengusutan kasus korupsi. Pada saat itu, lembaga antirasuah tersebut menerima kabar bahwa pengusaha swasta yang memberikan suap telah menggelontorkan uang senilai Rp2 miliar dari total sekitar Rp46 miliar yang disepakati.

"Uang Rp2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer," kata Asep.

Dia mengklaim tak akan memberikan perlakuan berbeda terhadap siapa pun yang memang berkaitan dengan kasus korupsi pada proyek senilai Rp231,8 miliar tersebut. Dia juga memastikan penyidik akan memanggil dan



Lima tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025). (ist)

memeriksa Bobby Nasution jika memang mengetahui soal praktik korupsi enam proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan Satker PJN Wilayah I Sumatra Utara.

"Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke Gubernurnya, kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan ditunggu saja ya," tutur Asep. (wid, blo, ist, kcm/dya)

**6 PROYEK JALAN
JERAT KADIS PUPR SUMUT
TOPAN GINTING**

Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara

- Proyek pembangunan jalan Sipiongot batas Labusel dengan nilai proyek Rp 96 miliar
- Proyek pembangunan jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai proyek Rp 61,8 miliar

Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara

- Proyek preservasi Jalan Simpang Kota Pinang menuju Gunung Tua hingga Simpang Pal XI pada tahun 2023, dengan nilai kontrak sebesar Rp 56,5 miliar
- Proyek lanjutan preservasi ruas yang sama, yakni Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI, untuk tahun anggaran 2024 dengan nilai Rp 17,5 miliar
- Pekerjaan rehabilitasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI serta penanganan titik longsor pada tahun 2025
- Proyek preservasi lanjutan di ruas Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI pada tahun 2025

**Menteri PU: Siapa Pun
Tidak Bersih Akan Disingkirkan**

MENTERI Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut, pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajarannya setelah operasi tangkap tangan oleh KPK. Satu dari lima tersangka merupakan pegawai Kementerian PU, yakni Helyanto.

Dody memastikan bahwa evaluasi internal dari tingkat pejabat eselon I hingga eselon III serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan dimulai setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa siapa pun yang tidak bersih akan disingkirkan dan penyelewengan wajib dihentikan.

Menurut Dody, Presiden Prabowo telah memberikan arahan tegas agar seluruh aparaturnya segera membenahi dan membersihkan diri, serta tidak ada toleransi terhadap pelaku penyelewengan yang akan dihentikan tanpa hormat.

Ia mengutip langsung ucapan Presiden yang berbunyi, "segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, karena yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang

bulu. Semua penyelewengan wajib berhenti atau yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat," kata Dody.

Dody menyebut arahan Presiden sangat jelas dan menjadi pegangan bagi dirinya dalam menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sejak menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum.

"Saya pikir arahan yang diberikan beliau sudah sangat clear sekali," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung yang telah membantu menjaga integritas kementerian melalui pengawasan dan penindakan terhadap perilaku yang merugikan negara dan masyarakat.

Menurutnya, langkah penegakan hukum tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara bersih, transparan, serta dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, terkait apakah oknum yang terjaring OTT oleh KPK di Sumatera Utara segera dipecah atau tidak, Dody hanya mengaku menjunjung tinggi asas praduga tak

bersalah.

Kendati demikian, dia mengaku terpekuk dan "tertampar" atas adanya oknum jajarannya yang terjaring OTT, apalagi dirinya kerap mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam mengabdikan diri kepada masyarakat.

Menurut catatan Badan Statistik total panjang jalan menurut kabupaten/kota dan tingkat kewenangan Pemerintahan di Provinsi Sumatra Utara adalah 81.321 kilometer (Km) pada 2024. Jumlah tersebut tidak terlalu bertumbuh alias stagnan dalam lima tahun. (wid, rls, ist/dya)

Deadline 2 Pekan untuk Produsen Beras Abal-abal

SATGAS PANGAN: PENJARA 5 TAHUN, DENDA RP 2 MILIAR

Pemerintah mengancam pengusaha beras untuk segera mematuhi regulasi terkait mutu, harga dan kesesuaian informasi di kemasan produknya. Aksi tipu-tipu mereka merugikan konsumen dalam jumlah besar. Nyaris Rp100 triliun, tepatnya Rp99,35 triliun.



Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman

Kepala Satgas Pangan Polri, Hefli Assegaf memberikan batas waktu dua pekan bagi pengusaha beras yang diduga curang untuk segera melakukan penyesuaian berdasarkan aturan. "Jika tidak dilakukan, Satgas Pangan akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku," kata Hefli, Jakarta, dikutip Minggu (29/6/2025).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan.

Pasal 9 melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar. Pelanggaran terhadap kedua pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

Lalu, Pasal 62 mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Pelanggaran meliputi berbagai aspek seperti produksi dan peredaran yang tidak sesuai standar, informasi yang menyesatkan, serta pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

"Pasal 62, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah mengatur sedemikian rupa dan apabila rekan-rekan masih melakukan hal tersebut tentunya kita akan melakukan penegakan hukum dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar," beber Hefli.

Lebih jauh, pemerintah memberikan waktu 2 minggu kepada Satgas Pangan, dihitung sejak Kamis (26/6/2025), untuk kembali melaksanakan investigasi di pasar tradisional dan ritel modern. Apabila masih ditemukan pelanggaran, maka Satgas Pangan Polri akan melakukan penindakan hukum.

Apabila masih ditemukan

pelanggaran, maka Satgas Pangan Polri akan melakukan penindakan hukum. "Artinya tanggal 10 Juli kita akan melakukan pengecekan ke seluruh retail, baik retail modern maupun pasar tradisional. Apabila masih ditemukan pelaku pidana yang dimaksud, maka kita akan melakukan penindakan hukum. Kita akan tindak tegas karena jelas sangat merugikan

konsumen," katanya.

Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus), Andi Herman tak kalah kerasnya. Ditegaskan, pelanggaran terhadap harga eceran tertinggi (HET) serta mutu produk yang tidak sesuai standar memiliki konsekuensi hukum. Tujuannya adalah memberikan efek jera serta

Pengamat: Ketidaktahuan Konsumen hingga Penegakan Hukum Lemah

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menilai adanya tindakan penyelewengan itu terjadi karena banyak sebab. Salah satunya karena konsumen tidak memiliki akses penuh terhadap informasi mengenai kualitas, komposisi atau asal-usul beras yang bereka beli.

"Nah pedagang yang melakukan praktik oplosan pun itu memanfaatkan ketidaktahuan konsumen dan ketiadaan traceability ini untuk memaksimalkan keuntungan," kata Eliza, Minggu (29/6/2025).

Hal ini membuat konsumen membayar harga premium untuk produk yang tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikannya.

Di sisi lain temuan Kementerian Pertanian yang menyatakan ada 85,56% beras premium dan 88,24% beras medium di jual tidak sesuai regulasi menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap standar mutu.

Selain itu, praktik oplosan yang dianggap biasa di pasar-pasar induk mengindikasikan normalisasi pelanggaran, yang menunjukkan kegagalan dalam sistem pengawasan pasar dan rendahnya risiko hukuman

bagi pelaku.

"Jadi memang perlu efek jera misal mencabut izin usaha atau denda berkali kali lipat," tegas Eliza.

Eliza mengingatkan, praktik oplosan yang marak dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap pasar beras dan institusi pengawas.

Hal ini dapat memicu keresahan sosial, pasalnya, beras ini komoditas yang begitu sensitif dan bisa menentukan stabilitas ekonomi sosial.

Menurut Eliza, pasar beras di Indonesia memang cenderung oligopolistik atau didominasi dengan perusahaan tertentu di tingkat distribusi dan ritel. Sehingga, selisih keuntungan terbesar diserap di distributor, sementara petani sendiri itu tidak mendapatkan keuntungan lebih dari 40% dari nilai tambah beras yang mereka produksi.

Untuk itu, Eliza meminta kepada pemerintah agar menindak tegas pelaku kejahatan dengan sanksi yang jelas dan efek jera.

Kedua, pemerintah perlu mereformasi rantai pasok industri beras dengan memperpendek rantai pasok dan mendorong penjualan langsung dari petani ke konsumen.

memperbaiki tata kelola niaga pangan nasional.

"Oleh karena itu, diberikan kesempatan dan waktu untuk segera menghentikan perbuatan curang tersebut dan memperbaiki tata kelola agar harga pangan dapat terjangkau sebagaimana yang diharapkan," ujar Andi Herman. (wid,rls,ant/dya)

PERFORMA PRODUKSI BERAS 2025/26 VERSI FAO

Brasil (Naik)

14.7%

Indonesia (Naik)

4.5%

China (Naik)

0.6%

India (Naik)

0.3%

Vietnam (Naik)

0.3%

Ketiga, mewajibkan adanya sertifikasi mutu dan pelabelan yang transparan dalam perlindungan konsumen beras premium dan medium.

"Adanya sertifikasi ini akan meningkatkan traceability sehingga konsumen tau beras yang mereka konsumsi ini berasal darimana dan ditanan oleh petani siapa dengan metode seperti apa. Konsumen tidak dirugikan, membeli barang sesuai kualitasnya," ujarnya.

Pada hal data terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat lonjakan signifikan produksi beras Indonesia dalam laporan proyeksi tahun 2025/26.

Dengan estimasi produksi beras mencapai 35,6 juta ton, Indonesia menjadi negara dengan kenaikan produksi terbesar kedua di dunia, yaitu meningkat 4,5 persen. Hanya kalah dari Brasil yang mencatat peningkatan tajam sebesar 14,7 persen. (wid,rls,ist,ant/dya)

Puluhan SD di Kota Malang Minim Murid Baru, Bakal Dimerger?



(Ilustrasi) SDN Ketawanggede Kota Malang. (Santi/Lentera)

MALANG - Pada tahun ajaran 2025/2026, beberapa sekolah dasar (SD) negeri di Kota Malang minim siswa baru. Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang belum akan mengambil kebijakan penggabungan atau merger. Akan ditunggu hasil evaluasi minimal selama tiga tahun.

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan saat ini hanya ada dua SD yang jumlah murid barunya sangat minim. Namun disebutkan, kondisi tersebut masih

dapat berubah seiring dengan proses pendaftaran ulang dan pendaftaran jalur offline yang masih berlangsung.

"Kalau yang minim sekali ada dua, kalau tidak salah ya. Seperti di SDN Jatimulyo sudah terisi," ujarnya, Minggu (28/6/2025).

Suwarjana menegaskan, pihaknya tidak bisa gegabah melakukan merger atau menutup sekolah, hanya karena rendahnya jumlah siswa baru dalam satu tahun ajaran. Menurutnya, evaluasi akan dilakukan dalam rentang waktu lebih panjang.

"Kalau ada SD yang tidak ada siswanya, kami tidak bisa gegabah begitu saja untuk menutup atau merger. Karena bagaimanapun juga kami harus melihat di tahun berikutnya. Kalau memang tiga tahun berturut-turut minim terus, nah itu baru bisa kami merger," imbuhnya.

Saat ini, menurutnya, belum ada rencana merger sekolah untuk tahun ajaran 2025/2026. Disdikbud masih menunggu perkembangan jumlah siswa dan pertimbangan lainnya. "Belum. Kami lihat tiga tahun dulu," tegasnya.

Lebih lanjut, Suwarjana menyebut, dua wilayah kecamatan yang memiliki SD dengan jumlah siswa baru minim adalah Lowokwaru dan Sukun. Meski demikian, ia belum merinci nama sekolah secara spesifik.

Suwarjana juga memaparkan salah satu faktor utama rendahnya jumlah siswa di beberapa sekolah adalah kondisi kepadatan penduduk di wilayah sekitar. Menurutnya, banyak orang tua memilih menyekolahkan anak di SD yang lokasinya dekat dari rumah.

Selain itu, lanjutnya, beberapa wilayah memang tidak lagi memiliki banyak anak usia sekolah dasar. Oleh sebab itu, data sebaran anak dan

populasi usia SD di setiap kecamatan juga turut menjadi bahan evaluasi.

"Yang jelas juga, yang wilayahnya sekarang sudah nggak ada anak-anak yang usianya jenjang SD. Ada beberapa, nanti bisa dilihat di Dikdas," sambungnya.

Menanggapi kondisi tersebut, pihaknya tetap membuka pendaftaran siswa baru secara offline bagi SD yang belum memenuhi pagu. Langkah ini juga untuk mempermudah masyarakat dari wilayah sekitar, termasuk dari Kabupaten Malang.

"Boleh. Offline. Karena kalau online lagi pasti akan membingungkan masyarakat. Di pengumuman kami pun ada, yang belum terpenuhi (SD) bisa membuka pendaftaran offline," ucap Suwarjana.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflih Adhim, menyampaikan dari total 195 SD negeri yang ada, sebanyak 93 SD masih minim murid baru. Sehingga belum memenuhi pagu siswa baru hingga pertengahan Juni 2025.

"Dari data per 14 Juni 2025, itu ada 93 sekolah jenjang SD yang belum penuh pagunya," terangnya. (Santi/Dya)

Bantengan dan Kolak Goblok, 2 Unsur Budaya Kabupaten Malang Diajukan Jadi Warisan Budaya Takbenda

MALANG - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang mengajukan dua unsur budaya lokal untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Pertama kesenian Bantengan dari wilayah lereng Semeru di Kecamatan Tirtoyudo. Dan kedua, minuman tradisional Kolak Goblok dari Kecamatan Poncokusumo.

Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Purwoto, menjelaskan pengajuan WBTB kepada Kementerian Kebudayaan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelestarian dan pengakuan terhadap kekayaan budaya khas daerah.

"Tahun ini kami sedang dalam proses pengajuan dua warisan budaya tak beda dari Kabupaten Malang, yaitu bantengan lereng Semeru dan kolak goblok. Keduanya merupakan representasi budaya lokal yang khas dan masih dilestarikan oleh masyarakat," ujar Purwoto, dikutip pada Minggu (29/6/2025).

Purwoto menjelaskan, sebelumnya Pemkab Malang sempat mengajukan kesenian bantengan sebagai warisan budaya takbenda. Namun, karena kesenian tersebut telah berkembang luas di berbagai wilayah lain, seperti Mojokerto, Kota Malang, dan Kota Batu, pengajuan tersebut belum berhasil membuahkan penetapan.

Menurutnya, salah satu kendala utama adalah lemahnya literatur dan bukti pendukung yang menegaskan, bantengan berasal dari Kabupaten Malang secara spesifik.

Selain itu, penyebaran kesenian ini di berbagai daerah membuatnya sulit diklaim sebagai kekayaan budaya eksklusif satu wilayah.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Purwoto akhirnya mencoba mengambil pendekatan baru. Dengan mengajukan varian bantengan yang lebih spesifik, yakni bantengan lereng Semeru. Kesenian ini berkembang di Kecamatan Tirtoyudo dan memiliki karakteristik yang membedakannya dari bantengan di daerah lain.

"Setiap daerah lereng punya ciri khas bantengannya sendiri. Seperti di lereng Semeru, gerakan dan atributnya berbeda, bahkan tidak menggunakan keranjang seperti di tempat lain. Itulah yang kini kami ajukan sebagai warisan budaya takbenda," jelas Purwoto.

Sementara itu, selain kesenian, Purwoto juga mengajukan minuman tradisional khas Desa Poncokusumo, yakni kolak goblok. Menurutnya, minuman ini unik karena terbuat dari labu kuning utuh. Yang bagian atasnya dilubangi untuk memasukkan gula merah dan parutan kelapa.

Setelah diisi, lanjutnya, labu kuning dimasak dalam wajan di atas tungku api hingga matang. "Kolak ini menjadi bagian penting dari berbagai



(Ilustrasi) Kesenian Bantengan Malang. (Santi/Lentera)

acara tradisional masyarakat di Poncokusumo. Hampir setiap ritual atau tradisi masyarakat di sana selalu menghadirkan minuman ini. Inilah yang menjadi dasar kami ajukannya sebagai WBTB," tambah Purwoto. (Santi/Dya)



Warga Palestina berbondong-bondong mendatangi pusat bantuan yang didirikan oleh Yayasan Bantuan Kemanusiaan Gaza yang dipimpin AS dan Israel di Jalan Pesisir di wilayah Sudaniya untuk menerima paket makanan di utara Kota Gaza, Gaza pada 17 Juni 2025. (Anadolu Agency)

TEPUNG BANTUAN GAZA DIDUGA DICAMPUR NARKOTIKA

Pusat distribusi bantuan di Gaza yang mendapat dukungan dari Israel dan AS diduga mencampurkan obat-obatan terlarang ke dalam kantong tepung yang dibagikan kepada warga yang paling terdampak perang dan rawan kelaparan. Tindakan ini disebut sebagai bentuk kejahatan baru yang menyasar kesehatan masyarakat sipil.

Dikutip dari Al Arabiya, Minggu (29/6/2025), Kantor Media Pemerintah Gaza menuduh Israel mencampur tepung dengan zat yang sangat adiktif menandai kejahatan baru yang mengerikan yang menargetkan kesehatan warga sipil dan tatanan masyarakat di Gaza.

"Kami menganggap pendudukan Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas kejahatan ini, yang bertujuan untuk menyebarkan kecanduan dan menghancurkan masyarakat Palestina dari dalam," kata pernyataan pemerintah Gaza tersebut.

Omar Hamad, seorang apoteker dan penulis dari daerah kantong yang dikepung itu, mengatakan bahwa Israel dilaporkan telah menyelundupkan Oxycodone ke Gaza melalui kantong tepung yang disediakan sebagai bantuan.

"Terungkap pula bahwa obat itu tidak hanya disembunyikan di dalam kantong tepung, tetapi tepung itu sendiri tampaknya tercampur dengannya," katanya pada hari Kamis dalam sebuah posting di X.

Komite Anti-Narkoba di Gaza mendesak warga untuk berhati-hati, memeriksa makanan yang berasal dari 'perangkap maut yang disebut pusat bantuan AS-Israel' dan segera melaporkan zat asing apa pun.

Diketahui Perserikatan Bangsa-Bangsa pada minggu ini mengutuk "persenjataan makanan" Israel di Gaza, sebuah kejahatan perang, dan mendesak militer Israel untuk "berhenti menembaki orang-orang yang mencoba mendapatkan makanan."

Berdasarkan data PBB, lebih dari 410 warga Palestina telah tewas dan sedikitnya 3.000 orang terluka karena

militer Israel menembaki warga Palestina yang mencoba mencapai titik distribusi bantuan atau mereka yang mengumpulkan bantuan kemanusiaan.

"Orang-orang yang putus asa dan lapar di Gaza terus menghadapi pilihan yang tidak manusiawi, yaitu mati kelaparan atau berisiko dibunuh saat mencoba mendapatkan makanan," kata kantor hak asasi manusia PBB dalam catatan tertulis yang diberikan sebelum pengarahannya pada hari Selasa.

Diketahui Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung AS dan Israel memulai operasi distribusi makanan di Gaza pada 26 Mei setelah Israel benar-benar menghentikan pasokan ke wilayah Palestina yang diduduki selama lebih dari dua bulan,

yang memicu peringatan akan terjadinya kelaparan massal. (Al Arabiya, ist/nei)

KONTROVERSI & KRITIK BENJAMIN NETANYAHU

- KONTROVERSI SEPUTAR NETANYAHU (KASUS 1000, 2000, 4000)**

 - **Kasus 1000:** Dugaan menerima hadiah mewah dari pengusaha sebagai imbalan bantuan politik.
 - **Kasus 2000:** Tuduhan negosiasi dengan pemilik media untuk liputan positif.
 - **Kasus 4000:** Dituduh beri keuntungan pada Bezeq demi pemberitaan menguntungkan; disidangkan sejak 2020. Netanyahu membantah semua tuduhan.
- PELEMAHAN LEMBAGA HUKUM**

Pada 2023, Netanyahu mendorong reformasi yudisial yang mengurangi kekuasaan Mahkamah Agung. Kritik menyebut ini sebagai ancaman bagi demokrasi.
- KOALISI EKSTREM KANAN**

Sejak 2022, Netanyahu berkoalisi dengan partai ultra-nasionalis dan ultra-Ortodoks seperti Religious Zionism dan Otzma Yehudit, yang memicu diskriminasi terhadap warga Palestina dan minoritas.
- KEBIJAKAN PALESTINA YANG KERAS**

Netanyahu memperluas permukiman ilegal, memberlakukan blokade Gaza, dan melakukan serangan militer yang dikecam internasional sebagai pelanggaran HAM.
- MANUEVER POLITIK**

Sering membubarkan parlemen dan memicu pemilu berulang (5 kali dalam 4 tahun) demi mempertahankan kekuasaan dan menghindari proses hukum.
- POLARISASI DAN PERPECAHAN**

Kepemimpinannya memecah masyarakat: pendukung fanatik vs penentang yang menilai ia merusak demokrasi. Demonstrasi besar terjadi sejak 2023.
- ISOLASI GLOBAL**

Meski sukses menjalin hubungan dengan beberapa negara Arab (Abraham Accords), citranya memburuk akibat kekerasan di Gaza dan kebijakan kontroversial.



Bennett: 20 Tahun Cukup, Netanyahu Saatnya Pergi

MANTAN Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, menegaskan bahwa saatnya Benjamin Netanyahu mengakhiri kepemimpinannya di Israel.

Bennett menilai kekuasaan yang terlalu lama tidak sehat bagi negara dan menjadi sumber perpecahan masyarakat.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Channel 12 Israel yang tayang pada Sabtu (28/6/2025), Bennett menyampaikan kritik tajam terhadap Netanyahu yang telah memimpin Israel selama dua dekade, baik secara berturut-turut maupun terpisah.

"Netanyahu telah memikul tanggung jawab besar atas perpecahan dalam masyarakat Israel," ujar Bennett, dikutip dari AFP, Minggu (29/6/2025). Ia menambahkan, "Netanyahu harus pergi".

Menurut Bennett, keretakan di internal Israel semakin dalam di bawah pemerintahan Netanyahu, yang meskipun memiliki basis pendukung kuat, juga menghadapi gelombang penentangan.

Salah satu pemicu utama kritik adalah penanganan Netanyahu terhadap perang di Gaza sejak

Oktober 2023.

Sebagai tokoh sayap kanan, Bennett pernah bergabung dengan para penentang Netanyahu pada 2021 untuk membentuk koalisi pemerintahan yang berhasil menggulingkan Netanyahu dari kursi perdana menteri setelah 12 tahun berturut-turut menjabat. Namun, koalisi tersebut hanya bertahan sekitar satu tahun sebelum akhirnya runtuh.

Setelah pemerintahan Bennett kolaps, Israel menggelar pemilu dadakan. Netanyahu kemudian kembali menjabat sebagai perdana menteri dengan dukungan partai-partai sayap kanan dan kelompok ultra-Ortodoks.

Bennett saat ini masih berada di luar panggung politik, namun spekulasi mengenai kembalinya ke arena politik kembali menguat.

Survei menunjukkan ia berpotensi menggalang cukup dukungan untuk kembali menantang Netanyahu. Meski pemilu reguler berikutnya dijadwalkan pada akhir 2026, pemilu dini bukan hal asing di kancah politik Israel.

Dalam wawancara yang sama, Bennett juga mengklaim bahwa pemerintahannya telah meletakkan

dasar bagi kampanye pemboman situs nuklir dan fasilitas militer Iran yang dilancarkan Israel awal bulan ini.

"Keputusan itu sangat baik dan memang diperlukan," kata Bennett. Ia menegaskan, serangan terhadap Republik Islam Iran tersebut tidak akan terjadi tanpa kerja keras dari pemerintahannya yang berumur pendek. (AFP,ist/nei)

Solusi Diet Sehat untuk Picky Eater

Bagi sebagian orang, memilih makanan bukan sekadar urusan selera, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan makan yang telah tertanam sejak lama. Picky eater orang dengan pilihan makanan yang terbatas sering kali mengalami tantangan saat mencoba menerapkan pola makan yang sehat. Kebiasaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti ketidaksukaan terhadap tekstur tertentu, rasa makanan yang dianggap terlalu tajam, hingga pengalaman makan yang kurang menyenangkan di masa lalu.

Kondisi ini membuat banyak orang dengan kebiasaan makan yang terbatas merasa sulit menemukan pilihan makanan sehat, meskipun mereka memiliki keinginan untuk menjaga kesehatan tubuh.

Namun, menjadi seorang picky eater bukan berarti tidak bisa menjalani diet yang seimbang dan bergizi. Dengan pendekatan yang tepat, makanan sehat bisa disesuaikan dengan selera pribadi tanpa mengorbankan kebutuhan nutrisi tubuh.

Berikut tips praktis bagi picky eater yang ingin menjaga pola makan sehat tanpa rasa terpaksa. Mulai dari cara mengenali jenis makanan yang disukai, bagaimana memperkenalkan variasi makanan secara bertahap, hingga strategi untuk menjaga keseimbangan gizi dalam menu harian. Dengan sedikit kreativitas dan kesabaran, picky eater pun bisa menikmati makanan yang enak dan bergizi, sehingga gaya hidup sehat tetap bisa dijalani dengan nyaman.

Es Krim Pisang

Anda bisa mengolah pisang dengan mentega kacang, bubuk kakao tanpa pemanis, atau susu favorit untuk membuat es krim pisang. Camilan beku ini memiliki tekstur mirip es krim tanpa tambahan gula atau lemak jenuh. Pisang adalah sumber kalium yang kaya. Satu buah pisang medium mengandung 422 miligram (mg) kalium. Kalium sangat penting untuk kesehatan tulang, jantung, dan otot.

Sereal Sarapan Fortifikasi

Sereal sarapan yang difortifikasi bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan zat besi jika tidak suka buah atau sayuran yang kaya mineral ini. Zat besi membantu membentuk

hemoglobin, bagian penting dari sel darah merah. Hemoglobin mengantarkan oksigen ke berbagai bagian tubuh. Zat besi sangat penting karena tubuh tidak bisa memproduksinya sendiri.

Tergantung pada jenis sereal sarapan yang dipilih, beberapa variasi mungkin juga mengandung vitamin B, kalsium, dan serat. Vitamin B membantu proses metabolisme, yaitu cara tubuh mendapatkan energi dari makanan.

Kalsium adalah mineral yang penting untuk tulang dan gigi yang kuat. Kekurangan kalsium dalam diet dapat meningkatkan risiko osteoporosis, atau tulang yang rapuh yang mudah patah. Serat membantu Anda merasa kenyang lebih lama dan mendukung pencernaan.

Buah Beku Kering

Beberapa picky eater mungkin tidak menyukai tekstur buah-buahan tertentu. Anda bisa mengonsumsi serat, mineral, dan vitamin dalam buah-buahan dengan memakannya yang dibekukan kering. Metode persiapan ini mengubah tekstur buah menjadi lebih ringan dan renyah. Satu porsi setengah cangkir buah kering dihitung sebagai satu porsi buah.

Makaroni dan Keju

Makaroni dan keju memberikan zat besi dari pasta, serta kalium dan vitamin D dari keju dan susu. Vitamin D membantu penyerapan kalsium, yang sangat penting untuk kesehatan tulang.

Anda mungkin menganggap makaroni dan keju sebagai makanan tidak sehat, tetapi bisa dibuat menjadi sehat. Cobalah m e m a s a k

makaroni dan keju di rumah dengan menggunakan keju rendah lemak dan pasta biji-bijian utuh. Anda bisa menambahkan labu butternut atau kembang kol yang dihaluskan untuk meningkatkan nilai gizi makanan.

Pizza

Pizza bisa menjadi makanan sehat untuk picky eater. Pertimbangkan untuk membuat pizza di rumah dengan menggunakan keju rendah lemak dan kulit pizza dari kembang kol atau biji-bijian utuh. Kulit pizza adalah sumber karbohidrat, makronutrien yang penting. Tubuh membutuhkan karbohidrat, yang diubah menjadi glukosa dan digunakan sebagai energi.

Smoothie

Anda bisa menambahkan satu

hingga dua porsi buah dan sayuran ke dalam smoothie untuk membantu mencapai tujuan harian. Smoothie bisa menjadi alternatif yang optimal jika Anda tidak suka tekstur buah dan sayuran. Menambahkan buah beku akan membuat teksturnya lebih kental.

Menambahkan lebih banyak cairan akan membuatnya lebih cair. Cobalah mencampurkan 8 oz susu favorit Anda, setengah cangkir pisang beku, dan setengah cangkir blueberi beku. Anda bisa menambahkan bayam bayi, yogurt rendah lemak, oatmeal, atau biji rami untuk meningkatkan nilai gizi.

Burger Sayuran

Burger sayuran bisa menjadi makanan sehat bagi orang yang tidak makan daging. Cari burger sayuran yang terbuat dari kacang-kacangan, lentil, atau sayuran. Sumber protein nabati ini mengandung serat, folat, magnesium, dan kalium.

Folat adalah vitamin B yang membantu pembentukan sel darah merah dan mendukung fungsi seluler. Magnesium mendukung lebih dari 300 reaksi dalam tubuh. Mineral ini mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, otot, dan saraf. (nei,ist/dya)



UEA MAU BANGUN KOTA AI, BEROPERASI 2027

Uni Emirat Arab (UEA) berencana mendirikan kota yang mengandalkan kecerdasan buatan (AI) di Abu Dhabi. Seluruh layanan publik dan swasta di kota tersebut akan diubah secara menyeluruh melalui satu platform AI terintegrasi yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027.

Menurut laporan Khaleej Times, proyek ambisius ini akan didanai dengan investasi sebesar 2,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 40,7 triliun. Proyek ini akan dikerjakan oleh perusahaan teknologi asal Italia, Synapsia, yang bekerja sama dengan Bold Technologies dari Uni Emirat Arab.

Langkah ini menunjukkan tekad kuat negara-negara Teluk untuk berada di garis depan dalam inovasi kecerdasan buatan. Pengumuman proyek tersebut dilakukan hanya satu minggu setelah topik kecerdasan buatan menjadi sorotan utama dalam kunjungan Presiden AS Donald Trump

ke wilayah tersebut.

AI kini menjadi medan persaingan utama antara Amerika Serikat dan China. Namun, negara-negara Teluk seperti UEA melihat AI bukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga sebagai kendaraan menuju masa depan baru yang tidak lagi bertumpu pada ekspor energi.

Platform baru ini dinamai Aion Sentia. Tujuannya adalah menyatukan layanan publik dan swasta ke dalam satu sistem terpadu, mulai dari transportasi umum otomatis, integrasi rumah pintar, hingga dukungan layanan kesehatan berbasis AI.

UEA telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka ingin menjadi pemimpin global dalam teknologi AI. Penasehat Keamanan Nasional UEA, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, bahkan aktif mencari investor asing, termasuk dari Amerika Serikat, untuk

mendukung infrastruktur AI nasional. Di sisi lain, Arab Saudi juga mengikuti langkah serupa melalui proyek futuristik kota Neom yang akan dikelola dengan sistem AI.

Dalam kunjungan ke Timur Tengah pekan lalu, Presiden Trump menyetujui kerja sama besar dengan UEA untuk membangun kampus AI terbesar di dunia di luar Amerika Serikat. Kesepakatan ini sekaligus menghapuskan pembatasan sebelumnya yang melarang UEA mengakses chip canggih buatan AS karena kekhawatiran akan bocor ke China.

Pada Maret 2025, Synapsia dan Bold Technologies menandatangani kesepakatan yang didukung pemerintah UEA untuk menerapkan mesin kecerdasan buatan mereka, MAIA, guna

mengatur lalu lintas, pencahayaan publik, transportasi, dan sistem keamanan perkotaan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi sekaligus menekan konsumsi energi.

"Kami ingin melangkah ke level berikutnya. Bayangkan AI yang begitu mengenal Anda, hingga bisa merekomendasikan tempat makan malam ulang tahun terbaik, dan langsung mememesannya tanpa Anda harus melakukan apa pun. Itulah kekuatan MAIA. Ini hanya satu contoh bagaimana Aion Sentia akan mendefinisikan ulang arti kenyamanan," ujar Daniele Marinelli, CEO My Aion Inc, kepada Khaleej Times.

Sementara dalam pernyataan resmi di situs Synapsia pada Maret 2025 disebutkan bahwa kesepakatan ini mencakup investasi besar dalam pengembangan Cognitive Cities, konsep baru yang melampaui kota pintar, dengan pengelolaan kota secara otonom melalui AI generatif.. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Rahasia Bridesmaid Tampil Kompak dan Modis

Menjadi bridesmaid adalah sebuah kehormatan yang istimewa. Sebagai bagian dari momen bahagia sang pengantin, tentu kamu ingin tampil menawan dan memberikan dukungan terbaik di hari istimewa tersebut. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah pemilihan baju bridesmaid yang tepat bukan hanya untuk tampil serasi, tetapi juga untuk merasa nyaman sepanjang acara.

Lalu, bagaimana cara memilih baju bridesmaid yang stylish, nyaman, dan tetap selaras dengan tema pernikahan? Apa saja yang perlu dipertimbangkan agar tampilanmu dan para bridesmaid lainnya terlihat kompak dan memukau? Artikel ini akan membahas secara lengkap berbagai tips dan pertimbangan dalam memilih baju bridesmaid yang sempurna.

Pertimbangan Utama

Memilih baju bridesmaid bukan hanya tentang model yang cantik, tetapi juga tentang keselarasan dengan konsep pernikahan dan kenyamanan para bridesmaid. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama yang perlu kamu perhatikan:

Konsep Pernikahan

Konsep pernikahan adalah fondasi utama dalam memilih baju bridesmaid. Pernikahan dengan gaya klasik akan sangat cocok dengan gaun elegan dari bahan satin atau organza. Sebaliknya, tema rustic akan lebih pas dengan gaun flowy berbahan chiffon dan warna earth tone. Jika pernikahan

mengusung adat tradisional, kebaya bisa menjadi pilihan yang tepat. Pertimbangkan juga lokasi (indoor atau outdoor) dan cuaca, karena ini akan memengaruhi pemilihan bahan dan model.

Misalnya, pernikahan di pantai membutuhkan bahan yang ringan seperti linen atau katun, sementara pernikahan di tempat dingin membutuhkan bahan yang lebih tebal seperti satin. Dengan menyesuaikan baju bridesmaid dengan konsep pernikahan, kamu akan menciptakan harmoni visual yang indah dan mendukung suasana acara.

Warna Baju Bridesmaid

Warna baju bridesmaid sebaiknya melengkapi gaun pengantin, tanpa membuatnya terlihat terlalu mencolok atau mendominasi. Warna-warna lembut seperti blush pink, mint, lavender, atau dusty blue sangat cocok untuk tema romantis. Untuk tema glamor, pertimbangkan warna navy, emerald, burgundy, atau gold. Pastikan warna tersebut juga selaras dengan keseluruhan konsep pernikahan.

Hindari warna yang terlalu mencolok yang dapat mengalihkan perhatian dari pengantin. Pemilihan warna yang tepat akan menciptakan tampilan yang elegan dan harmonis, serta memastikan bahwa pengantin tetap menjadi pusat perhatian.

Bahan Baju Bridesmaid

Pilihlah bahan yang nyaman dan sesuai dengan cuaca. Bahan ringan dan menyerap keringat seperti

chiffon, katun, atau linen sangat cocok untuk cuaca panas atau pernikahan outdoor. Bahan yang lebih tebal seperti satin atau velvet cocok untuk cuaca dingin atau pernikahan indoor. Pertimbangkan juga kemewahan bahan, satin dan silk memberikan kesan mewah. Brokat memberikan tekstur dan pola yang cantik, tetapi mungkin kurang nyaman untuk cuaca panas.

Kenyamanan bridesmaid adalah prioritas utama. Pastikan bahan yang dipilih memungkinkan mereka bergerak leluasa dan merasa nyaman sepanjang acara.

Model Baju Bridesmaid

Meskipun sebaiknya seragam warna, berikan kebebasan kepada bridesmaid untuk memilih model yang sesuai dengan bentuk tubuh masing-masing. Model A-line atau mermaid cocok untuk berbagai bentuk tubuh. Model off-shoulder menambah kesan feminin.

Untuk bridesmaid berhijab, gamis satin atau brokat merupakan pilihan yang baik. Hindari model yang terlalu rumit atau menyaingi gaun pengantin. Model yang simpel dan elegan lebih aman. Memberikan sedikit fleksibilitas dalam pemilihan model akan membuat para bridesmaid merasa lebih percaya diri dan nyaman dengan penampilan mereka.

Aksesori Pendukung

Gunakan aksesori untuk menyatukan penampilan para bridesmaid dan melengkapi gaun pengantin. Buket bunga, perhiasan, atau aksesori

rambut dapat digunakan. Namun, hindari aksesori yang berlebihan. Kesederhanaan dan keanggunan lebih diutamakan. Aksesori yang tepat akan menambahkan sentuhan akhir yang sempurna pada penampilan bridesmaid, tanpa mengalihkan perhatian dari pengantin.

Tips Tambahan

Membuat baju bridesmaid secara made-to-order memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan warna, ukuran, dan model sesuai keinginan, sehingga hasil akhirnya bisa lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, penting juga untuk memberikan ruang bagi para bridesmaid untuk mengekspresikan gaya pribadi mereka, tentu tetap dalam batas-batas tema pernikahan agar keseluruhan tampilan tetap harmonis.

Untuk mendapatkan hasil terbaik, sebaiknya lakukan konsultasi dengan desainer atau penjahit berpengalaman agar mendapat saran yang tepat serta inspirasi desain yang sesuai dengan selera dan konsep acara.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Sahabat Fimela dapat memilih baju bridesmaid yang elegan, stylish, nyaman, dan sesuai dengan konsep pernikahan. Ingatlah bahwa tujuan utama adalah menciptakan penampilan yang harmonis dan mendukung keindahan pengantin. (nei,ist/dya)



Pisah Pemilu 2029, (dari Hal 1) ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memisahkan jadwal pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah mulai 2029. Perubahan ini mengakhiri praktik pemilu serentak yang diberlakukan sejak 2019, ketika warga harus mencoblos lima surat suara dalam satu hari untuk calon presiden, DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan putusan MK, pemilu nasional ke depan hanya akan mencakup pemilihan presiden/wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD.

Sementara, pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota akan digelar bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) paling lambat dua tahun enam bulan setelah pelantikan presiden dan anggota DPR/DPD.

Pengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini menilai, putusan MK untuk memisahkan waktu pemilu legislatif dan pilkada memberikan angin segar bagi para penyelenggara pemilu di lapangan, khususnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ia menyoroti pengalaman pahit Pemilu 2019, yang menyebabkan hampir 800 petugas pemilu meninggal dunia akibat kelelahan kerja.

"Itu bukti nyata bahwa penyelenggaraan pemilu serentak dalam satu waktu menimbulkan beban kerja yang sangat berat," ujarnya, Minggu (29/6/2025).

Meski pada Pemilu 2024 jumlah korban menurun, Sardini menilai tekanan pada badan ad-hoc tetap besar. Oleh karena itu, putusan MK yang memungkinkan adanya jeda antara pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah dinilai mampu mengurangi tekanan tersebut dan memberi ruang konsentrasi yang lebih baik bagi para petugas.

Jeda waktu penting untuk kualitas demokrasi. Selain pertimbangan teknis, ia juga menilai bahwa pemisahan waktu antara pemilu nasional dan pilkada memiliki nilai strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden yang berdekatan dengan pilkada pada tahun yang sama berisiko membuat pemilih kehilangan fokus terhadap tujuan masing-masing pemilihan.

"Konsentrasi publik terhadap makna dan tujuan pemilu bisa buyar ketika dalam tahun yang sama, mereka dihadapkan pada pemilu legislatif, presiden, dan kemudian pilkada," jelasnya.

Dengan adanya jeda sekitar dua hingga dua setengah tahun antara keduanya, masyarakat akan memiliki waktu cukup untuk memulihkan perhatian dan kembali fokus pada

agenda politik lokal.

Terpisah, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah bakal mengharuskan masa jabatan DPRD 2024-2029 diperpanjang. Alasannya, putusan MK tersebut berpotensi mengakibatkan kekosongan jabatan pada 2029 mendatang karena tidak ada ketentuan yang memungkinkan dilakukannya penunjukan penjabat (Pj) untuk DPRD, tak seperti kepala daerah.

"Kalau bagi pejabat gubernur, bupati, wali kota kita bisa tujuk penjabat seperti yang kemarin. Tetapi untuk anggota DPRD satu-satunya cara adalah dengan cara kita memperpanjang masa jabatan," ujar Rifqinizamy.

Ia mencontohkan, jika pemilu nasional langsung digelar pada 2029, pemilu daerah baru akan digelar beberapa tahun setelahnya sebagaimana putusan MK. Oleh karena itu, Komisi II perlu mengkaji dan menyusun aturan untuk melaksanakan pemilu nasional dan daerah secara daerah, terutama pada masa transisi.

"Salah satu misalnya, pertanyaan teknisnya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan pemilu lokal setelah terlaksananya pemilu nasional tahun

2029, misalnya," kata Rifqinizamy.

"Secara asertif pemilunya baru bisa dilaksanakan pada tahun 2031. Jeda waktu 2029-2031 untuk DPRD, provinsi, kabupaten, kota termasuk untuk jabatan gubernur, bupati, wali kota itu kan harus ada norma transisi," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Rifqinizamy menegaskan putusan MK tersebut juga akan menjadi bahan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Momentum Revisi UU Pemilu

Kendati demikian, Sardini menilai bahwa keputusan ini belum menjawab persoalan mendasar dalam sistem pemilu Indonesia.

Ia menyayangkan bahwa problem akut seperti praktik politik uang, dinasti politik, dan korupsi elektoral belum disentuh dalam putusan tersebut. "Putusan MK ini belum menyentuh akar penyakit pemilu kita, seperti politik uang dan dominasi oligarki yang merusak integritas demokrasi," tegasnya.

Sardini berharap, pembentukan undang-undang yang lebih progresif dibutuhkan untuk mengatur hal-hal krusial seperti keterlibatan aparat penegak hukum dalam pemilu, serta penguatan sistem check and balance pada antara lembaga negara. "Kita butuh undang-undang yang bisa

memperkuat kemurnian suara rakyat dan melindungi pemilu dari intimidasi serta politisasi bansos," tutupnya.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan pilkada harus dimaknai sebagai dorongan kuat untuk segera merevisi Undang-Undang Pemilu. Meski putusan MK bersifat mengikat secara hukum, tindak lanjut berupa revisi regulasi belum juga tampak konkret.

"Sudah banyak desakan dari berbagai pihak agar Undang-Undang Pemilu dibahas ulang, tapi sampai sekarang belum terlihat langkah nyata," ujarnya saat dihubungi secara terpisah, Minggu (29/6/2025).

Menurutnya, akumulasi putusan-putusan MK yang berkaitan dengan sistem pemilu, serta wacana perubahan sistem pemilu seharusnya bisa menjadi titik awal bagi pemerintah untuk mengambil peran lebih aktif, bahkan jika perlu memimpin langsung proses revisi undang-undang. "Jadi kalau saya sih merasa bahwa ini sudah saatnya pemerintah mengambil peran yang signifikan atau bahkan kalau perlu mengambil alih bagaimana pembahasan Undang-Undang Pemilu ini agar segera dilakukan," katanya.(wid,rls,kcm,ant/dya)

Bergulir Wacana Pansus Omnibus Law UU Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal berbuntut panjang. Salah satu dampaknya, perpanjangan masa jabatan para legislator DPRD. Hal ini dipandang DPR RI tak bisa diselesaikan lewat panitia kerja (Panja) komisi semata, melainkan kerja lintas komisi lewat panitia khusus (Pansus).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menjelaskan, putusan MK tersebut membawa implikasi ketatanegaraan yang tidak sederhana. Sehingga, perlu dicermati secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem demokrasi dan tatanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

"Perpanjangan masa jabatan DPRD, misalnya, bukan perkara mudah. Kita perlu duduk bersama antara DPR, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyepakati langkah-langkah strategis guna mengantisipasi konsekuensi dari putusan MK tersebut," ujar Aria dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (29/6/2025).

Implikasi tersebut, kata dia, mengharuskan urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Pemilu yang baru secara lebih menyeluruh. Aria menilai, pembahasan RUU tersebut idealnya tidak cukup hanya melalui panitia kerja (panja), tetapi bisa dipertimbangkan melalui panitia khusus (pansus) lintas komisi mengingat kompleksitas persoalan yang akan timbul ke depan.

"Apakah nantinya kita akan menambahkan pasal peralihan atau menyisipkan norma baru dalam UU Pemilu, itu harus dipikirkan secara integral, tidak bisa sepotong-sepotong. Ini soal desain besar penyelenggaraan pemilu yang akan memengaruhi ekosistem demokrasi nasional," tuturnya.

Politikus PDIP itu menyinggung, pentingnya pendekatan kodifikasi atau omnibus law dalam menyusun undang-undang kepemiluan agar regulasi yang dihasilkan bersifat komprehensif. Aria menyebut, langkah korektif ini penting agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar merespons dinamika terbaru dan memperbaiki kekurangan dari sistem sebelumnya.

"Undang-undang pemilu ke depan harus merupakan hasil dari proses corrective action yang menyeluruh dan menjawab

tantangan yang belum terakomodasi dalam undang-undang yang berlaku sekarang," jelas Aria.

Di sisi lain, DPR masih melakukan kajian, menyerap aspirasi publik, dan melakukan simulasi menyusul putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan ini membuat pemilu nasional dan daerah berjeda waktu 2 hingga 2,5 tahun.

"Komisi II DPR terus melakukan belanja informasi dari berbagai kalangan seperti cendekiawan, budayawan, rohaniawan, politisi, hingga akademisi, baik dari dalam maupun luar kampus. Ini untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu sebelumnya, baik pilpres, pileg, maupun pilkada yang bahkan hingga kini belum seluruhnya selesai," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima.

Aria mengatakan setiap lima tahun sekali, Komisi II DPR selalu mengevaluasi peraturan terkait pemilu sebagai bagian dari penyempurnaan demokrasi nasional. Evaluasi itu, lanjut dia, bisa bermuara pada perubahan, penambahan, maupun amendemen Undang-Undang Pemilu. (din,wid,rls/dya)

INDONESIA DIMINTA SAUDI PERSIAPKAN HAJI 2026 LEBIH AWAL, KENAPA?

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi berpesan kepada Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan penyelenggaraan haji 2026 sedini mungkin.



Jamaah haji Banyuwangi saat proses kepulangan di Bandara Jeddah. (Dok)

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan pesan ini usai bertemu dengan Deputy Bidang Hubungan Luar Negeri Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Hasan Munakirah.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, kedua negara membahas pelaksanaan haji tahun ini sekaligus persiapan haji tahun depan. Hilman, yang juga Penanggung Jawab Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PIIH) Arab Saudi, bertemu dengan deputy didampingi oleh Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M. Hanafi dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

"Kami bertemu Deputy Kementerian Haji Saudi, mendiskusikan hal yang terjadi tahun ini. Kami semua bersyukur atas pertolongan Allah dan dengan kerja keras bahu-membahu, persoalan yang muncul pada saat operasional (haji) bisa kami selesaikan bersama-sama," kata Hilman di Jeddah, dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi Kementerian Agama Minggu (29/6/2025).

Dia menjelaskan, Deputy Kementerian Haji dan Umrah Saudi mengingatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders di Indonesia untuk mempersiapkan penyelenggara haji sedari awal. Menurut Hilman, Hasan Munakirah meminta agar proses persiapan dilakukan lebih dini, sesuai tahapan yang sudah ditetapkan Arab Saudi.

Adapun Pemerintah Arab Saudi telah memberikan lini masa atau timeline penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026. Info tahapan haji tahun depan itu diberikan pada pertemuan penutupan penyelenggaraan haji 2025 di Makkah, 12 Zulhijjah 1446 H atau 8 Juni 2025 lalu.

"Tahapan itu mulai dari penetapan kuota, penetapan lokasi di Masya'ir, persiapan kontrak, penentuan jamaah, pelunasan dan lainnya. Ini memang disarankan lebih awal," tutur Hilman. "Tentu kami akan menyampaikan ini kepada

stakeholders terkait untuk penyelenggaraan haji 1447 H."

Pengajuan Visa Selesai Sebelum Idul Fitri

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Firman M. Nur mengatakan, "Tahapan itu mulai dari penetapan kuota, penetapan lokasi di masya'ir,

persiapan kontrak, penentuan jamaah, pelunasan dan lainnya. Ini memang disarankan lebih awal," ujarnya.

Firman mencontohkan biasanya proses pengajuan visa haji berlangsung hingga bulan Zulkaidah. Namun untuk haji 2026, tahapan itu harus sudah selesai sebelum atau maksimal pada hari raya Idul Fitri.

"Artinya, setelah Idul Fitri, tidak ada lagi pengajuan visa haji. Padahal

biasanya visa haji masih dibuka sampai bulan Zulkaidah," terangnya.

Firman juga menegaskan pemerintah Indonesia harus mampu merespons secara cepat dan tepat agar tidak tertinggal dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Jangan sampai terlambat mengikuti timeline yang sudah ditetapkan Saudi. Jika sampai terlambat, isu pemangkasan kuota haji untuk Indonesia bisa saja terjadi," katanya. (wid,rls,ant/dya)

Timeline Haji 2026

- 8 Juni 2025: Awal penerimaan dokumen dan panduan haji.
- 26 Juli 2025: Data tenda & transfer dana via Masar Nusuk.
- 9-23 Agustus 2025: Konfirmasi penggunaan tenda musim sebelumnya.
- 24 Agustus 2025: Kontrak layanan, hotel, dan transportasi dimulai.
- 12 Oktober 2025: Batas pengumuman pendaftaran & unggah data jamaah.
- 9 November 2025: Penandatanganan kontrak layanan & pergerakan.
- 21 Desember 2025: Batas pembayaran tenda, hotel, dan transportasi.
- 4 Januari 2026: Kontrak paket dasar & layanan penerbangan final.
- 20 Januari 2026: Batas transfer dana untuk layanan hotel/transit.
- 1 Februari 2026: Finalisasi kontrak hotel & pembayaran transportasi.
- 8 Februari 2026: Batas unggah data jamaah & awal penerbitan visa.
- 20 Maret 2026: Batas akhir penerbitan visa.
- 25 Maret 2026: Mulai pengiriman Pre-Arrival Data.
- 18 April 2026: Tenda diterima; kedatangan jamaah ke Arab Saudi.



Tahun Depan Diambil Alih BP Haji

BADAN Penyelenggara (BP) Haji bakal mengambil alih kewenangan pengelolaan ibadah haji dari tangan Kementerian Agama mulai tahun depan. Badan itu membeberkan tiga upaya pembenahan pelaksanaan haji 2026.

"Penyelenggaraan haji tahun ini faktanya banyak kesemrawutan dan saya harus akui itu dengan terbuka," tutur Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil menyebut Badan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal kepemimpinannya itu harus membenahi sejumlah hal, seperti persiapan data jamaah haji hingga pelaksanaan puncak haji.

BP Haji, kata dia, masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki rekomendasi Panitia Khusus atau Pansus Haji 2024 lalu. Selain itu, Badan juga perlu melakukan perbaikan yang didasarkan pada nota diplomatik dari Kerajaan Arab Saudi. Menurut Dahnil, pemerintah sedang menyiapkan prosedur operasi

standar atau SOP untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji.

Pembenahan kedua, ujar Dahnil, berkaitan dengan integritas pengelolaan haji. "Kami akan pastikan praktik rente, korupsi, dan manipulasi harus diberantas semaksimal mungkin," kata politikus Partai Gerindra itu. Dengan demikian, menurut dia penyelenggaraan haji bisa menjadi efisien, nyaman dan aman bagi jamaah haji Indonesia.

Ketiga, Dahnil menyatakan BP Haji akan memperbaiki pola diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi. "Kami mau hentikan komunikasi yang berpura-pura, dan tidak jujur dari sisi kita," kata dia. Upaya pembenahan dari sisi komunikasi ini, ia mengklaim, sudah dimulai dengan pembicaraan persiapan haji sejak dini.

Dia pun mendorong pengesahan revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. BP Haji belum bisa sepenuhnya mengelola

penyelenggaraan haji lantaran UU tersebut belum direvisi. Pasal 10 UU Haji menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji reguler merupakan tanggung jawab pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah menunjuk menteri agama menyelenggarakan ibadah haji. "Kami berharap bisa selesai bulan-bulan depan ini supaya kami bisa bekerja segera," tutur Dahnil. (wid,rla,ist/dya)